



PEMBATASAN AKSES INTERNET SEBAGAI UPAYA CHINA MENJAGA KEAMANAN NASIONAL: THE GREAT FIREWALL OF CHINA

Faisal Mufti Zulfikar

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Satya Negara Indonesia

Surel: faisal.mufti.zulfikar@gmail.com

Tanggal pengiriman: 15 Februari 2023 | Tanggal revisi: 13 Maret 2023 | Tanggal diterima: 16 Maret 2023

ABSTRACT

The Internet is a key factor in driving globalization. The internet enables people around the world to have an easier access to expand knowledge and collaborate. As such, countries seek to learn how the Internet works. However, China, which has the largest number of internet users in the world, instead created a censorship system called the Great Firewall of China. China set up the system because it saw that the Internet was formed by the values of freedom promoted by the western countries. Therefore, national security became the main factor motivating China to build the system. By using the theory of neoliberalism and the concept of national security, this research aims to explain the Great Firewall of China to protect its national security. The research method used in this research is analytical descriptive, with literature studies in place. The results of the study show that the idea of cyber sovereignty promoted by China has not only led to the implementation of a censorship system at the domestic level, but has also had an impact on the multinational company Google in China. The Great Firewall of China forced Google to leave China.

Keywords: China, Internet, The Great Firewall of China, globalization, cyber sovereignty

ABSTRAK

Internet adalah faktor kunci dalam mendorong globalisasi. Internet memungkinkan orang di seluruh dunia memiliki akses yang lebih mudah untuk memperluas pengetahuan dan berkolaborasi. Dengan demikian, negara-negara berusaha mempelajari cara kerja Internet. Namun, China yang memiliki jumlah pengguna internet terbesar di dunia malah membuat sistem sensor yang disebut Great Firewall of China. China membuat sistem tersebut karena melihat bahwa Internet dibentuk oleh nilai-nilai kebebasan yang diusung oleh negara-negara barat. Oleh karena itu, keamanan nasional menjadi faktor utama yang memotivasi China untuk membangun sistem tersebut. Dengan menggunakan teori neoliberalisme dan konsep keamanan nasional, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Great Firewall of China untuk melindungi keamanan nasionalnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan kedaulatan dunia maya yang diusung China tidak hanya berujung pada penerapan sistem sensor di tingkat domestik, tetapi juga berdampak pada perusahaan multinasional Google di China. Great Firewall of China memaksa Google untuk meninggalkan China.

Kata Kunci: Tiongkok, Internet, *The Great Firewall of China*, globalisasi, kedaulatan siber

LATAR BELAKANG

Di era globalisasi tiap negara dituntut untuk bisa beradaptasi serta berinovasi di berbagai bidang kehidupan supaya bisa bertahan dalam masifnya perubahan globalisasi. Perubahan yang mendasar dapat dilihat dari mulai terbukanya arus pertukaran informasi, yaitu penggunaan sarana internet yang perlahan-lahan menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Perkembangan dunia teknologi dengan hadirnya internet juga membawa manfaat yang luar biasa bagi perkembangan peradaban manusia, dimana seseorang dapat dengan mudah mengakses informasi dari penjuru dunia hanya dengan memakai perangkat internet yang sudah terhubung ke seluruh dunia. Hal ini menyebabkan kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional perlu untuk dipertimbangkan kembali, mengingat masifnya perkembangan internet.

Melihat kondisi tersebut, tentu disadari betul oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang dengan berusaha menjadikan internet sebagai sebuah medan baru yang perlu dikuasai, dikontrol, dijelajahi, dan dipertahankan seperti halnya medan fisik yang berupa daratan, lautan, ruang udara, dan ruang angkasa (Faida, 2015). Hal inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah Tiongkok membuat beragam kebijakan atau regulasi terkait penggunaan internet di negaranya. Seperti yang diketahui, Tiongkok merupakan negara yang memiliki ideologi komunis dengan pemerintahan partai berada di tingkat paling atas. Dalam usaha mengatasi kekhawatiran akan terjadinya pemberontakan ataupun segala bentuk tindakan yang mengancam stabilitas keamanan nasionalnya, maka dibuatlah regulasi yang dinamakan "The Great Firewall of China" sebagai alat untuk mengatur akses internet masyarakat China (Mahardy, 2015).

The Great Firewall of China (GFW) merupakan suatu istilah untuk menyebut sistem penyensoran di Tiongkok. Sistem ini memungkinkan pemerintah Tiongkok mengatur *traffic* dari jaringan internasional secara virtual melalui sejumlah poin

akses berbagai peladen yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga informasi dari luar maupun dari dalam dapat dengan mudah dikontrol. GFW akan secara impulsif memblokir segala situs asing, media sosial, VPN, konten berita online, dan lain sebagainya apabila dianggap tidak layak atau menyudutkan pemerintahan Tiongkok beserta Partai Komunis (Abdullah, 2021).

Dalam praktiknya, sistem GFW memilah web yang akan diblokir melalui delapan kategori, diantaranya ialah: website bertukar informasi (*thepiratebay.se*, *slideshare.net*); media berita luar negeri (*nytimes.com*, *Bloomberg.com*, *rfa.org*); media aplikasi luar negeri (*youtube.com*, *facebook.com*, *twitter.com*, *wordpress.com*, *blogspot.com*); situs Falun Gong (*epochtimes.com*, *aboluowang.com*, *www.ntdv.com*, *dsbg*); website portal Tiongkok dan forum dialog luar negeri (*6park.com*, *wenxuecity.com*, *discuss.com*, *beijingspring.com*); situs video porno dan video game (Shen, 2014). Teknologi tersebut merupakan sistem yang memakai database sebagai panduan untuk mengawasi aktivitas yang digunakan oleh warga negara yang kemudian dilaporkan ke organisasi keamanan Tiongkok (Yuniarti, 2021).

Selain sistem GFW, Tiongkok juga memiliki dua tipe lain terkait penyensoran yakni, *The Golden Shield* dan *Keyboard Blocking* (Monggolio, 2016). Tiongkok menerapkan sistem penyensoran internet bukan semata-mata ingin membatasi kebebasan berbicara masyarakatnya, melainkan ada tujuan yang jauh lebih penting lagi. Dengan diterapkannya berbagai regulasi penyensoran, tentunya hal tersebut akan menjadi modal penting bagi Tiongkok untuk dapat menguasai teknologi siber serta gagasan mereka mengenai kedaulatan siber. Tiongkok mengawalinya dengan diterapkan di domestik mengenai kedaulatan siber, karena tata kelola internet merupakan salah satu isu strategis (seperti keamanan non-tradisional) pada abad ke-21 ini (Kolton, 2017).

Berbicara mengenai kedaulatan, konsep kedaulatan adalah konsep yang berbeda dari istilah yang lebih dikenal 'keamanan siber'. Sedangkan, istilah yang

dimaksud dengan kedaulatan siber menyangkut perlindungan infrastruktur dan proses yang terhubung ke internet, kedaulatan dunia siber berfokus pada informasi dan konten yang disediakan oleh internet (Schia & Gjesvik, 2017). Konsep kedaulatan siber Tiongkok memiliki dua prinsip utama yaitu: (1) Pengaruh yang tidak diinginkan dalam 'ruang informasi' suatu negara harus dilarang. Akibatnya, ini akan memungkinkan negara-negara untuk mencegah warganya terpapar ide dan opini yang dianggap berbahaya oleh rezim; (2) Mengalihkan tata kelola Internet dari badan-badan saat ini yang meliputi akademisi dan perusahaan, ke forum internasional seperti PBB. Langkah ini juga akan memerlukan transfer kekuasaan dari perusahaan dan individu ke negara saja.

Ide mengenai kedaulatan siber yang diusung oleh Tiongkok tidak serta merta diterima baik oleh negara-negara lain, terutama yang memiliki pandangan bersebrangan dengan Tiongkok seperti halnya Amerika Serikat (AS) beserta sekutunya. Karena seperti yang diketahui, internet berasal dari AS dan terus menerus berkembang dengan memegang nilai-nilai barat, yaitu kebebasan dalam mengakses dunia maya (Kolton, 2017). Sementara pemahaman Tiongkok mengenai internet berbeda, dimana kecenderungannya ialah penarikan secara progresif. Maksudnya negara turut terlibat melakukan intervensi kepada si pengguna. Hal tersebut didorong oleh kepentingan keamanan nasional, terlebih bagi intelijen pengawasan, dan enkripsi (Creemers, 2019).

Seperti yang telah disinggung sebelumnya mengenai keamanan di dalam hubungan internasional, keamanan sendiri merupakan topik bahasan yang kompleks. Hal ini dikarenakan keamanan merupakan bagian dari kehidupan manusia, sehingga akan terus mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Keamanan sendiri bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang bebas dari segala bentuk bahaya, ancaman, ketakutan, dan kecemasan. Terdapat istilah keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional, (1) keamanan tradisional diartikan ketika

terdapat ancaman yang berasal dari luar berupa aspek militer dan ancamannya berbentuk fisik. (2) keamanan non-tradisional diartikan sebagai ancaman yang bisa berasal dari berbagai aspek misal lingkungan hidup, energi, ekonomi, penyebaran virus, perdagangan narkoba, kejahatan siber, dan lain sebagainya (Sagena, 2013).

Tiongkok menilai bahwa internet merupakan salah satu medan perang baru untuk memperjuangkan sebuah opini masyarakat, pemerintah Tiongkok pun menilai bahwa media mempunyai kapabilitas yang sangat besar untuk mengontrol opini masyarakat. Melalui hal ini dapat diketahui bahwa perkembangan internet di Tiongkok memiliki relevansi dengan keamanan nasional di sana. Karena kejahatan siber itu bersifat sosial yang mengincar *social networking* misalnya, pembocoran dan pemalsuan data, *hoaks*, identitas palsu, perang informasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting bagi Tiongkok untuk menguasai arus persebaran informasi melalui internet, sehingga ancaman keamanan nasionalnya dikontrol.

Dapat dilihat bahwa isu siber atau dunia maya adalah isu yang menjadi salah satu masalah keamanan yang bisa dirasakan pada tiap negara. Dari beberapa penjabaran dari paragraf-paragraf sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut terkait topik ini. Oleh karena itu dirumuskanlah pertanyaan penelitian sebagai berikut “Bagaimana sistem *The Great Firewall of China* menjaga keamanan nasional Tiongkok?” Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, tujuan ditulisnya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai sistem keamanan internet *The Great Firewall of China* dalam menjaga keamanan nasional Tiongkok.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Rahma Eliya Faida (2015) dalam artikel ilmiah yang berjudul “Sensor Internet dan *Securitization* di Era *Cyberwarfare*: Studi Kasus Tiongkok”, tulisan ini bertujuan

untuk melihat motif diberlakukannya kebijakan sistem sensor internet pada segala perangkat komunikasi dan informasi di Tiongkok. Faida dalam menganalisis isu tersebut menggunakan teori dari Barry Buzan yakni teori *securitization*. Era baru ditandai dengan masifnya keberadaan sistem komunikasi melalui sarana internet yang membawa perubahan dalam studi hubungan internasional, misalnya saja dengan munculnya permasalahan baru yakni *cybercrime*. Tiongkok sebagai negara dengan jumlah pengguna internet yang sangat banyak menyadari akan hal tersebut, mereka menerima internet sebagai babak baru dalam globalisasi namun juga mengkhawatirkan, hal ini karena keberadaan internet yang membawa nilai-nilai kebebasan dari Barat. Maka dibentuklah kebijakan sistem sensor internet yang disebut *the great firewall of china* yang dibuat guna melindungi keamanan nasionalnya di berbagai bidang (Faida, 2015).

Penelitian ini membahas mengenai kesiapan Tiongkok dalam menghadapi era *cyberwarfare* yang dianalisis dikaitkan dengan kondisi geopolitik dan geostrategic masyarakat disana. Faida menjelaskannya diawali dengan menjabarkan kondisi yang melatarbelakangi Tiongkok menerbitkan kebijakan sensor internet. Penelitian ini secara rinci memaparkan mengenai sekuritisasi mengenai kebijakan sensor di segala bidang atau aspek keberlangsungan Tiongkok mulai dari politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Perbedaan penelitian Faida dengan penelitian yang penulis buat adalah fokus pembahasannya. Meskipun sama-sama membahas mengenai regulasi sensor internet, akan tetapi Faida lebih menonjolkan bagaimana sekuritisasi terkait regulasi tersebut. Sementara yang penulis coba tunjukkan dalam penelitian yang penulis buat adalah bagaimana GFW menjaga keamanan nasional Tiongkok.

Penelitian kedua, Muhammad Yusrizal (2014) dalam artikel ilmiah yang berjudul "Dampak Implementasi Kebijakan *The Great Firewall of China* Terhadap Aktivitas *Google Inc* di China", dengan menggunakan teori pengambilan keputusan

dari Richard Snyder, H. W. Buck, dan Burton Sapin. Yusrizal menjelaskan mengenai bagaimana kehadiran perusahaan *search engine* yang berasal dari Amerika Serikat yaitu Google pada 2006 membuat pemerintah Tiongkok merasa perlu mengawasi gerak gerik Google. Kebijakan *great firewall* diterapkan karena pemerintah Tiongkok tidak menginginkan Google berkembang pesat dengan ideologi kebebasannya, karena ideologi yang dimiliki Google akan membawa efek negatif bagi kepemimpinan partai komunis. Dampak lain dari penerapan *great firewall* tersebut juga yang melahirkan perusahaan *search engine* lokal yang diketahui bernama Baidu, Baidu berhasil menarik simpati masyarakat Tiongkok serta dinilai aman karena dianggap pro pemerintah (Yusrizal, 2014).

Penelitian Yusrizal lebih banyak memperlihatkan dampak kehadiran perusahaan Google di Tiongkok. Lebih lagi, Yusrizal mencoba memperlihatkan pembacanya untuk mengetahui tentang kebijakan sensor internet yang dilakukan Tiongkok terhadap Google yang kemudian melahirkan perusahaan *search engine* lokal pengganti Google.

Perbedaan penelitian Yusrizal dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada substansinya. Penelitian ini menyoroti dampak dari GFW terhadap perusahaan Google, sedangkan penelitian yang penulis coba lakukan melihat cara GFW mempertahankan keamanan nasional Tiongkok. Meskipun tidak terlalu focus membahas GFW, namun pembahasan mengenai dampaknya terhadap salah satu MNC dapat dijadikan rujukan yang akan penulis lakukan.

Ketiga, artikel yang berjudul "Internet Freedom in Asia: Case of Internet Censorship in China" yang ditulis oleh Zainuddin Muda Z. Monggolia (2016) menjelaskan mengenai bagaimana sejarah internet mulai berkembang di benua Asia pada sekitaran 1900-an dan dimulainya juga penyensoran pada penyebaran sistem informasi mulai dari Asia Utara, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai sensor di Tiongkok, yang

dibagi menjadi tiga yaitu *The Great Firewall*, *The Golden Shield*, dan *Keyword Blocking*. Serta menggambarkan kemunculan perusahaan *search engine* versi Tiongkok yaitu Weibo (Monggolio, 2016).

Penelitian yang ditulis oleh Zainuddin memaparkan secara besar perkembangan internet di benua Asia sampai pada akhirnya ke Tiongkok. Penelitian ini menemukan bahwa sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia Tiongkok justru menjadi negara yang paling ketat dalam regulasi pemakaian internet atau sensor. Penelitian ini juga melihat mengenai mekanisme atau cara kerja dari sensor internet di Tiongkok, serta dampaknya yang memunculkan mesin pencarian sendiri yakni *Weibo*.

Perbedaan yang terlihat antara penelitian Zainuddin dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada bagaimana penulis ingin fokus mengkaji GFW, sementara Zainuddin menjelaskan secara luas mengenai sejarah internet di Asia dan kemunculannya di Tiongkok. Akan tetapi, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penulis karena memiliki cakupan bahasan yang lengkap mengenai mekanisme cara kerja internet di Tiongkok, sehingga penulis masih melihat relevansi antara keduanya.

Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu teori yang terdapat dalam studi hubungan internasional yaitu Neorealisme. Neorealisme hadir sebagai bentuk kritik terhadap teori realisme yang memiliki asumsi dasar mengenai manusia bahwasannya sifat dasar dari manusia itu terbentuk dari perebutan kekuasaan (agresif) dalam ranah hubungan internasional. Menurut pandangan neorealisme, sifat dasar negara terbentuk dari struktur anarki internasional, dimana struktur tersebut memaksa negara untuk bertindak agresif (Dharmaputra, 2018).

Dalam buku yang berjudul “Kamus Hubungan Internasional”, dikatakan teori neorealisme dikembangkan oleh Kenneth Waltz pada tahun 1979 melalui buku yang iditulisnya *Theory of International Politics*. Teori ini merupakan serapan dari teori sebelumnya yakni teori realisme, namun terdapat perbedaan diantara keduanya. Teori ini menekankan pada struktur internasional yang anarki, Waltz menyebut terdapat empat karakteristik utama dalam struktur internasional, diantaranya: (1) Anarki atau tidak adanya otoritas tertinggi diatas negara; (2) negara merupakan unit sehingga sejarah yang terulang tidak bisa dihindari; (3) perbedaan pemahaman, kepentingan, dan kapasitas antarnegara mengakibatkan terjadinya perang maupun konflik internasional; dan (4) hubungan antara negara-negara adidaya akan mempengaruhi sistem internasional dan berpeluang memberikan perubahan (Ashari, 2015).

Neorealisme memiliki beberapa asumsi dasar yang mereka pahami, berikut diantaranya adalah (1) negara adalah aktor yang rasional; (2) tujuan utama negara adalah *survive* di lingkungan anarki; (3) negara tidak bisa memperkirakan maksud atau tujuan dari negara lain; (4) tiap negara memiliki kemampuan militer ofensif; dan (5) *great powers* adalah aktor utama dalam politik internasional. Secara sederhana perbedaan antara realisme klasik dengan neorealisme dapat dilihat dari fokus bahasan yang mereka teliti, dimana realisme klasik lebih melihat sifat manusia sementara neorealisme melihat kajiannya dari segi struktur internasional (Dharmaputra, 2018).

Konsep

Dalam bahasan studi hubungan internasional, keamanan adalah salah satu dari sekian isu yang menjadi kajian dalam ranah hubungan internasional dan tergolong cukup tua dikarenakan para peneliti telah lama membahas atau

menggunakan isu keamanan. Awalnya keamanan didefinisikan sebagai hubungan konflik yang melibatkan kubu Blok Barat dan Blok Timur pada masa Perang Dingin.

Secara umum, keamanan nasional didefinisikan sebagai kebutuhan dasar untuk menjaga dan melindungi segala suatu hal yang menjadi kepentingan negara dengan melibatkan kekuatan ekonomi, politik, dan militer untuk menghadapi ancaman yang dapat berasal dari dalam negara maupun dari luar negara. Atau bisa juga didefinisikan sebagai, kebutuhan untuk mempertahankan dan merawat eksistensi negara melalui ekonomi, politik, dan militer serta dapat melalui jalur alternatif yakni diplomasi. Konsep ini menggambarkan mengenai kemampuan pemerintahan suatu negara dalam menghadang ancaman yang berasal dari luar dan dari dalam negara tersebut (Sukmadi, 2010).

Ada pula pemahaman mengenai keamanan nasional yang juga dapat dimaknai sebagai sebuah situasi dimana unsur-unsur pokok yang membentuk negara (wilayah, masyarakat, dan pemerintah) tidak mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Keamanan nasional dalam bahasan studi hubungan internasional tidak lepas dari segala pembaharuan yang kompleks, maka kemudian terjadi perluasan arti terhadap konsep itu sendiri. Dan ada terbagi menjadi dua yakni keamanan tradisional (lebih berkuat pada militer) dan keamanan non-tradisional (lebih baru dan umumnya diluar militer (tapi dapat melibatkan militer)) (Meishita, 2014).

Penulis menggunakan konsep keamanan nasional karena isu penyensoran di Tiongkok dilakukan oleh pemerintah setempat bertujuan untuk mengamankan hal-hal yang mengancam keberlangsungan rezim mereka. Tiongkok juga memiliki pemikiran bahwa mereka harus bisa hidup mandiri, maksudnya ialah dikarenakan internet berasal dari AS tentu terdapat nilai-nilai Barat yang melekat pada internet. Sehingga masuk akal apabila Tiongkok melakukan regulasi pemakaian internet yang sangat ketat bagi masyarakat yang berada di Tiongkok. Penulis melihat konsep

keamanan nasional memiliki relevansi dengan isu yang penulis angkat dalam tulisan ini.

METODOLOGI

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif adalah penelitian yang sebuah data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto & Sutinah, 2005). Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian kualitatif ialah penelitian tentang riset yang memiliki sifatnya menggambarkan atau menjabarkan fenomena yang diteliti dan cenderung menggunakan analisis.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif cenderung lebih beragam dalam sisi pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. Sehingga dapat dilihat bahwa jenis penelitian ini lebih fleksibel jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Fleksibel dikatakan dikarenakan pendekatan kualitatif umumnya sering digunakan dalam beragam jenis penelitian seperti, 1) studi kasus, 2) deskriptif, 3) tindak kelas, 4) fenomenologi, 5) etnografi, 6) *grounded theory*, 7) sejarah, dan 8) hermeneutika (Samsu, 2017).

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Hidayat Syah, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang sedalam-dalamnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Sedangkan menurut Punaji Setyosari, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang atau segala sesuatu yang terikat dengan variabel-variabel yang dapat dijelaskan baik menggunakan kata-kata maupun angka (Samsu, 2017).

Analisis data dalam suatu penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan ketika seluruh data yang diperlukan sudah terperoleh secara lengkap. Analisis data kualitatif mempunyai sifat induktif, maksudnya suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Adapun komponen dalam analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut (Wekke, 2019):

Pertama, mereduksi data berarti merangkum, memilah-milih hal-hal yang inti, memfokuskan pada bagian yang penting, dicari tema dan *pattern*-nya. Dengan demikian data yang telah direduksi kan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya apabila diperlukan. Proses ini juga dilakukan untuk memisahkan antara mana yang data primer dan mana yang data sekunder, proses ini merupakan proses penting yang tidak boleh terlewat oleh seorang peneliti karena akan sangat bersignifikansi dalam memudahkan seorang peneliti untuk menjabarkan argument yang ingin disampaikan secara sistematis.

Kedua, tahapan selanjutnya setelah data direduksi ialah dengan menyajikan data, dalam penelitian kualitatif penyajian data umumnya berbentuk uraian singkat, yang bisa berbentuk bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam buku *Metodologi Penelitian Sosial*, mereka berpendapat bahwa cara yang umumnya dilakukan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif yakni dengan teks yang bersifat naratif.

Ketiga, tahapan ini merupakan proses terakhir dalam komponen analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah ada perubahan-perubahan bila tidak diiringi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan di bagian awal didukung oleh data-data yang valid dan kredibel, maka kesimpulan yang dikemukakan diawal dapat dipercaya.

Penelitian deskriptif analitis memfokuskan penelitiannya pada sudut pandang penjabaran atas sebuah fenomena yang terjadi selanjutnya dianalisis secara menyeluruh. Penggunaan data pada jenis penelitian ini akan di urai dengan sejelas-jelasnya, karena menggambarkan suatu keadaan subjek atau objek yang diteliti. Penulis beranggapan bahwa jenis penelitian deskriptif analitis memiliki kesesuaian dengan esensi yang penulis bahas.

Berdasarkan uraian yang telah ditulis di paragraf sebelumnya, penulis beranggapan bahwa pendekatan dan jenis penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian yang diangkat. Penulis berusaha untuk menganalisis data yang bentuknya teks maupun kata-kata yang sifatnya interpretatif dari partisipan yang bersangkutan. Dan pengumpulan data-data yang akan digunakan adalah data-data yang bercirikan kualitatif, baik itu buku, artikel ilmiah, serta sumber-sumber berita. Tentunya sumber yang digunakan oleh penulis merupakan sumber yang relevan dengan tema yang diangkat, yakni berkaitan dengan kedaulatan siber.

DISKUSI

Sejarah Singkat Internet di Tiongkok

Proyek internet terjadi saat berlangsungnya Perang Dingin yang didasari atas kekhawatiran AS atas serangan nuklir. Ternyata internet yang sedang kita nikmati sampai saat ini, ternyata memiliki sejarah yang panjang. Internet lahir di sekitar tahun 1960-an yang diawali dengan terciptanya program yang dinamai *Advanced Research Projects Agency Network* atau yang disingkat sebagai ARPANET. Kemudian di tahun 1962 dirumuskanlah ide awal mengenai jaringan global yang disebut jaringan komputer galaksi oleh Dr. Joseph Carl Robnett Licklider (Laily, 2022).

Pada sekitaran tahun 1980, internet mulai diberikan akses terbatas untuk menghubungkan berbagai universitas sebagai keperluan pendidikan di AS. Mulai sejak saat itu lah internet dipergunakan secara luas, dimana setiap sistem komputer

yang terkoneksi internet harus memiliki alamat IP berupa format atau simbol numerik sebagai tanda pengenal. Internet kemudian telah tersebar ke seluruh penjuru dunia dan tidak hanya dapat digunakan di komputer saja, melainkan sudah bisa koneksikan di berbagai perangkat (Indihome, 2022). Pengguna internet selalu berkembang tiap masa-nya, yang awalnya lahir di Barat kemudian penggunaanya terbesarnya berasal dari negara Timur.

Tiongkok merupakan negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia saat ini, dengan sekitar 800 juta lebih pengguna (dan masih terus bertambah hingga saat ini) (Hoffman, 2019). Menjadi negara yang memiliki pengguna internet terbesar di dunia tidak membuat kebebasan berinternet di Tiongkok terjamin, karena berdasarkan laporan dari Freedom House dilansir dari katadata menunjukkan bahwa kebebasan berinternet di Negeri Tirai Bambu menjadi yang paling buruk di dunia (Rizaty, 2022). Tiongkok melewati sejarah yang panjang untuk bisa ditahap seperti sekarang ini, mereka menjadi raksasa ekonomi di era saat ini karena mulai membuka pikiran mereka terhadap dunia internasional.

Di akhir 1990-an, Tiongkok memulai langkah dengan mencoba membuka diri kepada dunia luar setelah mengisolasi diri cukup lama. Para pemimpin Tiongkok kala itu bertekad untuk melakukan pengintegrasian negara mereka dengan dunia internasional, mereka melihat adanya peluang dalam pasar global (WTO) dan keberadaan teknologi seperti internet. Tiongkok menyadari bahwa mereka bukanlah masyarakat yang terbuka, oleh karenanya pemerintahan Tiongkok secara terus menerus mengembangkan ekonomi pasar global dan internet dengan sangat hati-hati agar tidak terjerumus arus yang dibawa oleh nilai-nilai Barat. Sehingga Tiongkok bekerja secara efisien, di satu sisi mereka memanfaatkan sistem yang dibawa Barat, di sisi lain mereka sembari mengelola ancaman terhadap stabilitas domestik mereka dengan kehati-hatiannya (Webster, 2019).

Tiongkok pertama kali secara resmi menerima akses internet pada 20 April 1994, yang awalnya pengguna internet kala itu hanya sekitar 10.000 pengguna kemudian mengalami pelonjakan pengguna yang signifikan. Menurut laporan survey yang dilakukan *China Internet Network Information Center (CINIC)*, mulai dari Juni 1998 sampai Desember 2002 terhitung jumlah komputer yang terkoneksi internet yang awalnya 542.000 menjadi 20.83 juta penggunanya. Hebatnya, perkembangan tersebut diimbangi dengan mulai bermunculannya budaya internet di Tiongkok, seperti munculnya Netease.com yang merupakan ruang obrolan secara daring yang berhasil menarik puluhan ribu pengunjung tiap harinya (Yang, 2003).

Banyaknya pengguna internet membuat pemerintah Tiongkok mulai menerapkan sistem regulasi bagi pengguna internet. Hal ini mulai diberlakukan secara komprehensif pada tahun 2010, ketika *China's State Council Information Office (SCIO)* menerbitkan buku putih yang berisi mengenai kebijakan internet. Dalam buku putih tersebut menyatakan bahwa internet berada di dalam kontrol dan yurisdiksi kedaulatan Tiongkok dan tiap-tiap orang yang berada di teritori Tiongkok wajib menaati hukum dan peraturan ini (Creemers, 2019). Berselang 4 tahun kemudian tepatnya pada tahun 2014, Tiongkok mendirikan *Cyberspace Administration of China (CAC)* yang bertanggung jawab terhadap *Central Leading for Internet Security and Informatisation (CLG)* yakni sebuah badan perumusan kebijakan dan pengimplementasian yang dibentuk terkait permasalahan internet (Ruan, 2019).

Secara sederhana sejarah internet di Tiongkok digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.

Timeline Perkembangan Internet pada akhir 1990-an

No	Tahun	Penjelasan
1.	Pertengahan 1995	Pengguna internet 40.000 di Tiongkok, naik 3.000 dari awal tahun itu
2.	1997	NetEase berdiri. Salah satu perusahaan internet yang menjadi pelopor di Tiongkok, yang menyediakan berita dan

		games
3.	Februari 1999	TencentQQ dirilis. Aplikasi obrolan sederhana yang diterapkan oleh individu dan bisnis
4.	April 1999	Alibaba berdiri. Perusahaan e-commerce yang berkembang menjadi raksasa

Sumber: *logicmac.io*

Pada akhir tahun 1990-an perkembangan internet di Tiongkok sangat masif. Dimulai dari basis pengguna skala kecil seperti universitas ternama dan lembaga penelitian, karena kepopulerannya kemudian internet merambah ke skala yang lebih besar seperti di kalangan masyarakat perkotaan yang berpendidikan, kaya, dan cenderung diterima dengan baik oleh kalangan muda saat itu.

Cara Kerja *The Great Firewall of China*

Sistem penyensoran GFW merupakan instrument penting bagi keberlangsungan Partai Komunis Tiongkok. Sebetulnya proyek ini sudah direncanakan sejak tahun 1980-an ketika pemerintah sudah menggagas ide tentang pengontrolan konten yang dapat diakses oleh masyarakat, setelah internet masuk ke Tiongkok barulah digalakkan sistem penyensoran ini. Konten yang tidak boleh diakses ataupun diperbuat oleh masyarakat di dunia maya antara lain: Menyebarkan ujaran atau informasi yang dapat memicu pertikaian; mengungkapkan segala rahasia negara; pornografi; konten yang berbau perjudian, kekerasan, atau pembunuhan; kegiatan yang mengganggu stabilitas keamanan jaringan (Ahmad, 2022).

Dalam sistem GFW yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok, terdapat metode pemblokiran utama yang digunakan dalam sistem tersebut terhadap konten-konten yang tersebar di *cyberspace*. Berikut merupakan 5 metode yang bekerja di dalam sistem GFW (Ahmad, 2022):

Pertama, pemblokiran URL (*Uniform Resource Locators*), metode ini dapat dikatakan sebagai metode paling efektif dalam upaya pembatasan akses internet

masyarakat disana. Sistem ini memindai kemudian mendeteksi kata kunci yang dilarang dalam situs web, setelah kata kunci terdeteksi maka secara langsung halaman web tersebut akan terblokir.

Kedua, pengecoh DNS (*Domain Name System*), cara kerja metode ini adalah ketika seseorang sedang mengetikkan URL di mesin pencarian, itu akan menjadi IP dan kemudian diidentifikasi dengan DNS. GFW akan mengecoh apabila konten yang dicari sensitif atau bertentangan dengan rezim, sehingga situs web yang ingin diakses akan otomatis terpenjara karena firewall memantaunya.

Ketiga, pemblokiran VPN, Tiongkok menentang penggunaan VPN tapi tidak melarangnya asalkan perusahaan VPN tersebut menyerahkan data pengguna serta mematuhi kebijakan sensor negara. Apabila terdapat seseorang memakai VPN ilegal, firewall akan menganalisis melalui paket data yang dikirim ke server yang nanti akan diketahui dari mana asalnya, termasuk segala kegiatan yang dibuka.

Keempat, *Man-in-the-Middle-Attacks*, situs web dalam mengirim sebuah data biasanya menggunakan sertifikat SSL agar nantinya terenkripsi. Metode MITMA memungkinkan otoritas Tiongkok membuat sertifikat yang dibuat sendiri, sehingga seperti tiruan. Fungsinya agar bisa menyadap dan mengumpulkan banyak data.

Kelima, *Probing Active*, probing adalah cara bagi otoritas Tiongkok untuk mengetahui siapa-siapa saja yang sedang berusaha mengelabui great firewall, nantinya GFW akan memeriksa permintaan si pengguna mengenai lokasi, apabila nantinya terdeteksi maka akan membatalkan permintaan itu dan memblokir IP.

Dapat terlihat bahwa tujuan dari dibuatnya sistem GFW untuk menekan perbedaan pandangan politik, mengontrol narasi agar pro ke pemerintah, dan mencegah masyarakat Tiongkok untuk mengakses konten yang beresiko membahayakan atau bertentangan dengan kebijakan negara. Dengan begitu, segala bentuk upaya seseorang untuk menjatuhkan negara akan segera diperingatkan atau dapat dipenjara, dengan kecanggihan sistem penyensoran yang dimiliki setiap

perbedaan pendapat akan segera terdeteksi, dibungkam, terhapus dari situs web. Hal tersebut mempermudah Tiongkok untuk mempertahankan doktrin ideologis yang kuat pada warganya, dengan klaim yang disebut oleh mereka bertujuan untuk melindungi warga negaranya (Chew, 2018).

Kedaulatan Siber Tiongkok

Istilah kedaulatan siber yang digunakan Tiongkok mengacu pada buku putih yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai tata kelola penggunaan internet serta hal-hal yang dilarang dalam penggunaannya. Definisi mengenai kedaulatan siber pernah digaungkan di Kerjasama Internasional Strategi Ruang Siber pada 2017 yang berbunyi:

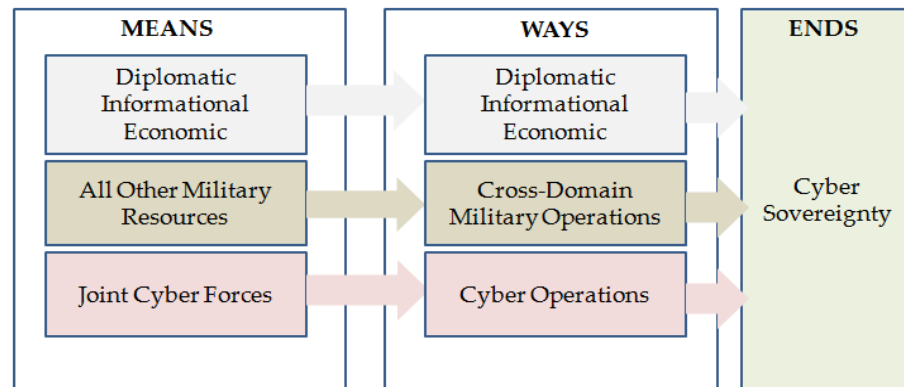
“Kedaulatan sebagaimana diabadikan dalam piagam PBB, merupakan norma dasar yang meliputi hubungan antar negara dengan meliputi dunia maya. Tiap negara harus menghormati hak masing-masing dalam mengelola dengan caranya sendiri dalam pengembangan dunia maya versi mereka, baik itu regulasi dunia maya, kebijakan internet bagi masyarakat, dan yang terpenting berpartisipasi dalam tata kelola dunia maya dengan tumpuan yang sama rata. Tidak ada negara mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Pemerintah nasional berhak mengelola dunia maya mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka menjalankan yurisdiksi atas infrastruktur, sumber daya, dan aktivitas teknik informasi komputer (TIK) dalam wilayah masing-masing, dan memiliki hak untuk melindungi aktivitas TIK dari segala ancaman, pengahancuran, penyerangan. Pemerintah nasional juga turut memiliki hak agar dapat menetapkan kebijakan publik, dan undang-undangnya. Dan larangan bagi negara-negara untuk menggunakan TIK sebagai alat untuk mengintervensi kedaulatan negara lain.” (MFA, 2017).

Demi mencapai impian Tiongkok untuk mewujudkan kedaulatan siber yang diidamkan, Partai Komunis Tiongkok mempercayai bahwa langkah awal yang perlu mereka lakukan ialah mengamankan ruang siber domestik mereka terlebih dahulu. Prinsip yang mendasari gagasan kedaulatan dunia maya dari dimensi normatif

mereka ialah (1) negara memiliki hak berdaulat seperti halnya negara lainnya; (2) negara memiliki kedaulatan atas aktor non-negara, baik itu lokal maupun asing; dan (3) persamaan kedaulatan negara dalam tata kelola internet (Creemers, 2019).

Gambar 1.
Strategi Siber Tiongkok Secara Sederhana



sumber: (Kolton, 2017)

Kedaulatan siber merupakan tujuan dari strategi siber yang direncanakan oleh Tiongkok. Dalam usaha untuk mencapai tujuan akhir dibutuhkan beragam bantuan dari berbagai bidang, seperti sektor ekonomi dan juga militer. Dalam mewujudkan strategi ini, pemerintah Tiongkok turut serta mempromosikan gagasan mereka mengenai kedaulatan siber di forum-forum internasional. Presiden Xi Jinping setiap pertemuan Konferensi Internet Dunia selalu menekankan mengenai ide kedaulatan siber ini. Hal tersebut pernah dilakukannya pada tahun 2015 di KTT internet dunia, mulai saat itu lah setiap ada kesempatan di KTT Tiongkok akan selalu yang terdepan membicarakan isu kedaulatan siber (Mckune & Ahmed, 2018).

Ide tentang kedaulatan siber pernah menjadi perbincangan hangat dan mendapatkan respon positif dari negara-negara lain ketika terdapat skandal yang diungkapkan oleh seseorang bernama Edward Snowden. Dia merupakan mantan staff yang pernah bekerja di Badan Keamanan Nasional AS, dia membocorkan informasi rahasia yang mengatakan organisasi tersebut melakukan spionase terhadap data-data para pengguna baik yang ada di AS maupun dari luar AS. Sehingga

menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada AS yang selalu mengusung ide “kebebasan”, namun justru memantau bahkan menggunakan data-data penggunaanya tanpa disadari (Reditya, 2021).

Pengaruh Kedaulatan Siber Tiongkok Terhadap MNC

Penulis mencoba mengambil kejadian yang pernah terjadi antara Tiongkok dengan perusahaan multinasional yang bekerja di bidang TIK yang berasal dari AS, yakni Google. Google merupakan perusahaan yang diketahui sangat besar, dan mengusung ide untuk memudahkan para penggunaanya untuk mengakses internet dengan sederhana. Sebetulnya, Google telah masuk ke Tiongkok sejak tahun 1999 dengan memakai domain Google.com yang merupakan wujud asli Google (Sheehan, 2018).

Pada tahun 2002, Google pernah diblokir tetapi tidak berselang lama dibuka kembali tetapi tidak dalam kondisi semula, maksudnya sensor mulai diterapkan dengan sangat ketat pada Google membuat performa situs pencarian tersebut menjadi sangat lamban. Barulah pada tahun 2006 Google secara resmi masuk ke dalam Tiongkok dengan memakai domain Google.cn dengan menandatangani berbagai perjanjian dan persetujuan untuk mengikuti protokol internet yang berlaku di Tiongkok (Mckune & Ahmed, 2018).

Google merasa bahwa kebijakan sensor ini sangat membatasi ruang gerak Tiongkok, oleh karena itu Google bertindak dengan melakukan pemindahan operasinya ke wilayah Hong Kong. Hong Kong menjadi destinasi dikarenakan kebijakan sensor tidak berlaku disana, dan menjadi langkah masuk akal bagi Google untuk menghindari sensor dari Tiongkok. Pada 2010 Google memindahkan seluruh operasinya ke Hong Kong agar terbebas dari jeratan sensor disana, Google memutuskan untuk pergi dikarenakan banyak kerugian dialami, bahkan Google.cn

digantikan dengan perusahaan situs pencarian lokal yang bernama Baidu (Haikal, 2019).

Analisis

Pada bagian ini penulis mencoba menganalisis secara sederhana mengenai teori yang penulis pakai dengan apa yang dilakukan Tiongkok terkait pembatasan internet yang terjadi di wilayah negaranya. Dimulai dengan pemahaman neorealisme yang fokus mengenai struktur internasional dalam percaturan dunia, dimana perkembangan ekonomi serta teknologi yang sangat masif membuat Tiongkok yang tadinya sangat tertutup akan dunia luar, kemudian perlahan-lahan mulai membuka diri terhadap dunia karena mereka melihat peluang dalam perkembangan tersebut.

Dengan masuknya internet di Tiongkok dan membawa nilai-nilai liberal yang berasal dari Barat, sesuai dengan salah satu asumsi dasar neorealisme yakni negara merupakan aktor rasional. Tiongkok sebagai aktor rasional berpikiran untuk bisa mengendalikan kekuatan internet yang sangat masif di ranah domestiknya dengan membuat kebijakan sensor melalui sistem GFW. Hal tersebut merupakan pilihan yang rasional untuk dilakukan Tiongkok, dikarenakan mereka menganggap bahwa jika kebebasan diberikan secara gamblang, nantinya akan beresiko membahayakan keamanan nasional. Karena setiap orang yang mengakses internet memiliki tindakan-tindakan yang tidak bisa diprediksi, jadi sebagai langkah pencegahan dibuatlah sistem GFW.

Hal tersebut terhubung pula dengan salah satu asumsi dasar selanjutnya, yaitu tujuan utama negara ialah bertahan hidup di lingkungan anarki. Tiongkok membuka dirinya dengan dunia karena keinginannya untuk terus menumbuhkan ekonomi tentunya, serta ada keinginan untuk menjadi kekuatan siber yang besar dengan ide kedaulatan siber milik mereka. Tiongkok juga mempromosikan ide

tersebut di pertemuan-pertemuan internasional, hal tersebut sah-sah saja jika mengacu ke karakteristik struktur internasional yang dikatakan oleh Waltz bahwa tidak ada otoritas tertinggi di atas negara, sehingga rencana untuk mempromosikan kedaulatan siber ke kancah internasional tidak ada yang dapat menentanginya.

KESIMPULAN

Internet sebagai sarana yang sangat menunjang untuk mempermudah hidup manusia diperlukan oleh tiap-tiap negara, salah satunya adalah Tiongkok. Tiongkok menjadi negara dengan jumlah pengguna internet paling banyak di dunia saat ini, sebagai usaha pemerintahan partai komunis disana dibentuk sistem pembatasan atau penyensoran terhadap akses konten di internet. Sistem yang digunakan diberikan nama *The Great Firewall of China*, dimana cara kerja sistem tersebut bermacam-macam sehingga akan sangat sulit bagi para masyarakat disana untuk mengakses konten-konten yang berbau sensitif bagi rezim disana. Dampak yang dirasakan oleh penyensoran tersebut tidak terasa di domestik saja, akan tetapi sistem tersebut juga berimplikasi terhadap perusahaan multinasional di Tiongkok yaitu Google yang akhirnya harus hengkang dari Tiongkok karena sudah tidak bisa bertahan disana.

Apabila dilihat dari sudut pandang Barat, mungkin apa yang dilakukan oleh Tiongkok sangat melanggar HAM dan terkesan negatif. Namun, jika dilihat dari sudut pandang dalam negeri Tiongkok ini merupakan hal yang sangat pintar dan cerdas tetapi memang terkesan keras. Ini bisa menjadi acuan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam usaha mengembangkan teknologinya, penulis memberikan sedikit masukan kepada para pembaca. Lihatlah dari beragam sudut pandang sehingga kita bisa mengetahui dan belajar dari Tiongkok, apa yang dilakukan dan tata caranya yang bisa dijadikan acuan untuk negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2021). "Great Firewall", *Upaya Cina Ciptakan Jagat Internetnya Sendiri*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/kitarakyatjelata/606b04f18ede480d9e0fb642/great-firewall-upaya-cina-ciptakan-jagat-internetnya-sendiri?page=all#section2>
- Ahmad, K. (2022). *What Is the Great Firewall of China and How Does It Work?* Makeuseof.Com. <https://www.makeuseof.com/what-is-great-firewall-china/>
- Ashari, K. (2015). *Kamus Hubungan Internasional* (I. Kurniawan (ed.); I). Nuansa Cendekia.
- Chew, W. C. (2018). *How It Works: Great Firewall of China*. Medium.Com. <https://medium.com/@chewweichun/how-it-works-great-firewall-of-china-c0ef16454475>
- Creemers, R. (2019). China's Conception of Cyber Sovereignty: Rhetoric and Realization. In D. Broeders & B. van den Berg (Eds.), *GOVERNING CYBERSPACE: Behaviour, Power, and Diplomacy* (p. 112). Rowman & Littlefield.
- Dharmaputra, R. (2018). Teori Hubungan Internasional ; Perspektif-Perspektif Klasik. In W. Septiyaningrum (Ed.), *Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)* (1st ed., Issue February, pp. 81–105). Cakra Studi Global Strategis.
- Faida, R. E. (2015). Sensor Internet dan Securitization di Era Cyberwarfare : Studi Kasus Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1, 31–46.
- Haikal, M. (2019). Kebijakan Censorship Tiongkok Terhadap Perusahaan Multinasional Dalam Bidang ICT (Information Communication Technologies) (Studi Kasus Google Inc.). *Global Political Studies Journal*, 3(1), 73–89.
- Hoffman, G. (2019). Cybersecurity Norm-Building and Signaling with China. In D. Broeders & B. van den Berg (Eds.), *Governing Cyberspace: Behaviour, Power, and Diplomacy* (p. 187). Rowman & Littlefield.
- Indihome. (2022). *Pengertian Internet: Ketahui Sejarah, Perkembangan, dan Manfaatnya*. Indihome.Co.Id. <https://indihome.co.id/blog/pengertian-internet-ketahui-sejarah-perkembangan-dan-manfaatnya>
- Kolton, M. (2017). Interpreting China's Pursuit of Cyber Sovereignty and its Views on Cyber Deterrence. *Army Cyber Institute*, 2(1), 119–154. https://www.jstor.org/stable/10.2307/26267405?seq=1&cid=pdfreference#%0Areferences_tab_contents
- Laily, I. N. (2022). *Menelusuri Sejarah Internet, Perkembangan dan Prediksi di Masa Depan*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/agung/berita/623bd668930c4/menelusuri-sejarah-internet-perkembangan-dan-prediksi-di-masa-depan>

-
- Mahardy, D. (2015). *Akses Internet di Tiongkok*. Liputan6.Com.
<https://www.liputan6.com/tekno/read/2167013/akses-internet-di-tiongkok-makin-sulit>
- Mckune, S., & Ahmed, S. (2018). The Contestation and Shaping of Cyber Norms Through China's Internet Sovereignty Agenda. *International Journal of Communication*, 12, 3835–3855.
- Meishita, N. V. (2014). Motivasi China Menguasai Cyber Teknologi (China ' s Motivation to Competence in Cyber Technology). *Universitas Negeri Jember*.
- MFA. (2017). *International Strategy of Cooperation on Cyberspace (Wangluo kongjian guoji hezuo zhanlüe)*.
- Monggolio, Z. M. (2016). Internet Freedom in Asia: Case of Internet Censorship in China. *Journal of Government and Politics*, 7(1), 153.
<https://doi.org/10.18196/jgp.2016.0026>
- Reditya, T. H. (2021). *Edward Snowden, Pembocor Dokumen Rahasia AS yang Dianggap Pahlawan*. Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/global/read/2021/09/08/160701370/edward-snowden-pembocor-dokumen-rahasia-as-yang-dianggap-pahlawan?page=all>
- Rizaty, M. A. (2022). *Tingkat Kebebasan Berinternet di Tiongkok Terendah Dunia*. Databoks.Katadata.Co.Id.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/18/tingkat-kebebasan-berinternet-di-tiongkok-terendah-dunia>
- Ruan, L. (2019). *Regulation of the internet in China: An explainer*. Theasiadialogue.Com.
<https://theasiadialogue.com/2019/10/07/regulation-of-the-internet-in-china-an-explainer/>
- Sagena, U. W. (2013). Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional Di Selat Malaka: Isu-Isu Dainteraksi Antar Aktor. *Jurnal Interdependence*, 1(1), 72–91.
- Samsu. (2017). Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development. In *Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)*.
- Schia, N. N., & Gjesvik, L. (2017). China 's cyber sovereignty (Policy Brief). *Norwegian Institute of International Affairs*, April, pp.1-4.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30512.15360>
- Sheehan, M. (2018). *How Google took on China—and lost*. Technologireview.Com.
<https://www.technologyreview.com/2018/12/19/138307/how-google-took-on-china-and-lost/>
- Shen, F. (2014). Great Wall of China. *Encyclopedia of Social Media and Politics*, 599–602.
- Sukmadi, B. H. (2010). *KEAMANAN NASIONAL: Sebuah Konsep dan Sistem bagi*

-
- Bangsa Indonesia* (E. Suhendar (ed.)). Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial Edisi Ketiga* (B. Suyanto & Sutinah (eds.); 3rd ed.). KENCANA.
- Webster, G. (2019). *A Brief History of The Chinese Internet*. Logicmag.Io.
<https://logicmag.io/china/a-brief-history-of-the-chinese-internet/>
- Wekke, I. S. (2019). Metode Penelitian Sosial. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (1st ed.). Gawe Buku.
- Yang, G. (2003). The Internet and civil society in China: A preliminary assessment. *Journal of Contemporary China*, 12(36), 453–475.
<https://doi.org/10.1080/10670560305471>
- Yuniarti, D. S. (2021). *Strategi Anti-Censorship Movement dalam Menyikapi Kebijakan Sensor di Cina Tahun 2000-2013*. Universitas Islam Indonesia.
- Yusrizal, M. (2014). Dampak Implementasi Kebijakan The Great Firewall oleh Pemerintah China Terhadap Aktivitas Google Inc di China (2006-2012). *Jurnal Jom FISIP*, 1(2), 1–47.